

**HOTLINE REDAKSI**

Telp. (0751) 25001-36923  
 Fax. (0751) 33572  
 email : singgalang.redaksi@gmail.com  
 website : www.hariansinggalang.co.id  
 epaper : epaper.hariansinggalang.co.id

**INFO & PENGADUAN**

Tlp. (0751) 25001-38338  
 Fax. (0751) 811005  
 Iklan :08126605015  
 Pemasaran: 085355173999  
 Redaksi : (0751) 36923  
 email: ikhansinggalang@yahoo.co.id

Rabu 18 September 2024 (14 Rabiul Awal 1446 H)

16 Halaman (Dalam 2 Bagian)

Rp5.000,-  
 Luar Kota + Ongkos Kirim



**Jadwal Shalat Hari Ini**

Subuh : 04.56 WIB  
 Zuhur : 12.16 WIB  
 Ashar : 15.21 WIB  
 Maghrib : 18.19 WIB  
 Isya : 19.27 WIB

kalam. sindonews.com

**KOMENTAR**

## Mendorong Partisipasi Pemilih Perempuan

ZONA RIDA RAHAYU

PEMILIH perempuan selalu menarik bagi kalangan peserta pemilu. Begitu juga dengan pemilihan gubernur/bupati/walikota yang akan berlangsung 27 November 2024. Pertama, jumlah pemilih perempuan yang hampir sama jumlahnya dengan pemilih laki-laki. KPU Sumbar merilis jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk kontestasi Pemilu 2024 sebanyak 4.088.606 jiwa dengan rincian 2.207.360 pemilih tetap laki-laki dan 2.061.246 merupakan pemilih tetap perempuan. Bahkan di beberapa daerah pemilih perempuan lebih banyak daripada jumlah pemilih laki-laki. Di Kota Solok, dari 55.832 orang pemilih terdapat 28.308 pemilih perempuan, sedangkan laki-laki hanya 27.524 pemilih.

Kedua, terdapat asumsi pemilih perempuan lebih loyal daripada pemilih laki-laki. Ini terbukti bahwa pemilih perempuan lebih dapat diandalkan, dan selalu menjadi prioritas peserta pemilu dengan berbagai strategi untuk menggaet mereka. Meskipun loyalitas pemilih perempuan dapat juga bergeser dengan berbagai faktor, terutama dari keluarga.

Data dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tahun 2021 menyebutkan bahwa, pemilih perempuan lebih loyal dibandingkan laki-laki. Hal ini tercermin dari mayoritas pengguna hak pilih pada Pemilu 2019 adalah pemilih perempuan. Kondisi ini terjadi karena, kebanyakan perempuan lebih banyak berada di rumah, sehingga memungkinkan pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan.

Ketiga, sangat sedikit calon kepala daerah perempuan yang muncul. Pada Pilkada di Sumatera Barat peserta pemilu didominasi oleh kaum laki-laki. Data KPU Sumbar menyebutkan terdapat 56 pasangan calon (paslon) kepala daerah yang maju

Bersambung ke A-3



SEGERA SAHKAN RUU PERLINDUNGAN PRT

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang PPRt membentangkan poster dan spanduk di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9). Aksi yang juga digelar di sepuluh kota lain di Indonesia itu bertujuan mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU PPRt sehingga hak asasi para pekerja rumah tangga dapat terlindungi. (Antara)

**MUHIDI DIUSULKAN JADI KETUA DPRD SUMBAR**

# Pimpinan DPRD Definitif Tunggu SK Kemendagri

PADANG - SINGGALANG

Usulan empat nama unsur pimpinan definitif DPRD Sumbar telah diserahkan pada gubernur untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri. Empat nama tersebut telah menjadi usulan resmi DPRD secara kelembagaan setelah ditetapkan dalam rapat paripurna, Selasa (17/9).

Keempat nama tersebut yakni Muhidi (PKS), diusulkan sebagai Ketua DPRD. Kemudian usulan sebagai Wakil Ketua, yakni Evi Yandri Rajo Budiman (Gerindra), Iqra Chissa Putra (Golkar) dan



Nanda Satria (Nasdem).

DPRD berharap SK dari Kemendagri dan peresman pimpinan definitif tersebut bisa terlaksana sebelum 1 Oktober yang bertepatan dengan Peringatan Hari Jadi Sumbar.

"Kita berharap SK dari Kemendagri ada sebelum 1 Oktober, sehingga rapat paripurna istimewa peringatan Hari Jadi Sumatera Barat bisa dipimpin oleh pimpinan definitif," ujar Ketua Sementara DPRD Sumbar, Irsyad Safar setelah memimpin rapat paripurna, Selasa (17/9) di gedung dewan setempat.

Irsyad mengatakan, peneta-

Bersambung ke A-3

Orbita Kemandirian  
**DOMPET DHUFA SINGGALANG**  
 Jl. Ir. H. Juanda No. 30 C, Pasar Pagi, Padang Barat, Kota Padang

**Zakat Penghasilan**  
 Sumber yang bersih lebih aman, lebih barokah

Salurkan Zakat Anda melalui:  
 mandiri **111.000.500.4888**  
 an Dompot Dhuafa Singgalang  
 BSI **234.2222.40**  
 an Dompot Dhuafa Republik

Informasi: (0751) 40098 & 081267023333



**Pojok**

- + Pimpinan DPRD Definitif Tunggu SK Kemendagri  
 - Mudah-mudahan ndak ado macet di jalan...
- + Ada Kerawanan Jika Kotak Kosong Menang  
 - Tanyo ciek, lai ado tim sukses kotak kosong ko?

**BAWASLU BUAT ATURAN PILKADA ULANG**

## Ada Kerawanan Jika Kotak Kosong Menang



Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja  
 Jakarta, Singgalang  
 Bawaslu RI merespons fenomena 41 kotak kosong di Pilkada 2024. Bawaslu

mengatakan ada kerawanan apabila kotak kosong menang, di mana akan ada Pilkada ulang.

"Kerawanannya adalah kalau seandainya, tadi sudah diselesaikan, kemarin pada saat RDP Komisi II (DPR) bahwa kalau calon kotak kosong menang maka tahun depannya, nah itu yang dihitung tapi dengan catatan bahwa kemungkinan akan di-take-

Bersambung ke A-7



## Sri Mulyani Menangis Pamit di DPR

**JAKARTA** - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih kepada Komisi XI hingga Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang telah menjadi mitra dari lembaganya selama ini. Sri Mulyani menyebut periode tugasnya sebagai menteri di era Presiden Joko Widodo

Bersambung ke A-7

**KEMBANGKAN POTENSI EKSPOR**

## Gubernur Mahyeldi Geliatkan Sektor Perdagangan dan IKM



**EKSPOR** - Gubernur Mahyeldi saat melepas ekspor produk kayu manis PT Sumatera Tropical Spices ke Amerika Serikat yang diproduksi di Padang Pariaman pada (21/8/2024) lalu. (ist)

**PADANG** - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy, menaruh perhatian besar untuk pengembangan sektor perdagangan, Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Sumbar. Keberlanjutan dan digitalisasi menjadi salah satu fokus utamanya dalam setiap kebijakan yang dijalankan sejak 4 tahun terakhir.

Gubernur menyebut pihaknya sengaja memberikan perhatian lebih kepada sektor ter-

Bersambung ke A-7

**99,9 PERSEN NAGARI/DESA TERALIRI LISTRIK**

## Untuk Sumbar Terang, Gubernur Giatkan Elektrifikasi



**PROGRAM TJSL** - Gubernur Mahyeldi saat penyerahan bantuan program TJSL bagi Kelompok Tani Sari Manih Tabu di Nagari Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Agam. (adpim)

**PADANG** - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy, terus memacu realisasi Program Unggulan Sumatera Barat Sejahtera dan Berkeadilan hingga akhir periode kepemimpinannya.

Sejumlah capaian telah berhasil dicatatkan. Termasuk capaian realisasi rasio elektrifikasi desa hingga bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang menuai pujian dan penghargaan nasional beberapa waktu

Bersambung ke A-7



**DPRD**  
Rapat paripurna penetapan fraksi-fraksi DPRD Sumbar periode 2024-2029, Selasa (17/9) di gedung dewan setempat. (Ist)

## DPRD Sumbar Umumkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi

PADANG - SINGGALANG

Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar periode Tahun 2024-2029 telah ditetapkan dan diumumkan saat rapat paripurna, Selasa (17/9) di gedung dewan setempat.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tujuh partai bisa menjadi fraksi sendiri sementara dua parpol yaitu PDIP dan PKB bergabung menjadi satu fraksi.

Ketua Sementara DPRD Provinsi Sumbar, Irsyad Syafar saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD paling sedikit lima orang, dapat membentuk fraksi sendiri.

Sedangkan anggotanya kurang dari lima orang dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk paling banyak dua Fraksi Gabungan.

"Berdasarkan ketentuan tersebut maka DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2024-2029 berjumlah delapan fraksi," kata Irsyad.

Delapan fraksi yang terbentuk tersebut, yakni PKS dengan anggota 10 orang. Kemudian Fraksi Gerindra juga berjumlah 10 orang. Golongan Karya dan

gan jumlah anggota 9 orang, Partai Nasdem juga 9 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki 8 orang anggota dan Fraksi Demokrat juga 8 orang.

Selanjutnya Fraksi PPP dengan jumlah anggota 5 orang bisa membentuk satu fraksi sesuai jumlah komisi di DPRD Sumbar, yaitu lima komisi. Terakhir, PDIP memiliki tiga kursi harus bergabung dengan PKB yang juga memiliki tiga kursi bergabung menjadi fraksi dengan jumlah anggota menjadi 6 orang.

"Meskipun fraksi bukan merupakan alat kelengkapan dewan (AKD), namun AKD memiliki fungsi yang sangat strategis untuk menentukan arah kebijakan lembaga dan anggota dewan," katanya.

Irsyad menambahkan, jika fraksi belum terbentuk maka AKD juga belum bisa dibentuk karena anggota AKD berasal dari fraksi-fraksi yang diusulkan secara proporsional.

Saat rapat paripurna tersebut sekaligus juga diumumkan pimpinan dari delapan fraksi tersebut. Fraksi PKS dengan struktur penasehat Muhidi, Ketua Irsyad Syafar, Wakil Ketua Mochklasim, Sekretaris Syofyan Hendri dan Bendahara Gustami Hidayat.

Kemudian Fraksi Gerindra

dengan Pembina Evi Yandri Rajo Budiman, Ketua Khairudin Simanjuntak, Wakil Ketua Verry Mulyadi dan Sekretaris Mario Syah Johan.

Fraksi Partai Golkar diketuai Yogi Pratama, Wakil Ketua Zulkenedi Said, Sekretaris Sitti Izzati Aziz dan Bendahara Zakasai Kasni.

Fraksi NasDem diketuai Endarmy, Wakil Ketua Abdul Rahman dan Sekretaris Erick Hamdani Dt. Ambasa.

Fraksi PAN dengan penasehat Indra Dt. Rajo Lelo, Ketua Muhayatul., Wakil Ketua Muzli M Nur dan Sekretaris Daswan-to.

Fraksi Partai Demokrat diketuai Doni Harsiva Yandri, Wakil Ketua Jefri Masrul, Sekretaris Gino Irwan dan Bendahara Benny Saswin Nasrun.

Kemudian, Fraksi PPP diketuai Sawal Dt. Putih, Wakil Ketua Daswipetra Dt. Manjingtj Alam dan Sekretaris Neldaswenti.

Terakhir, Fraksi PDI-Perjuangan dan PKB diketuai Albert Hendra Lukman dengan Wakil Ketua Firdaus dan Sekretaris Donizar.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Jinaldy dalam rapat paripurna tersebut menyatakan, pemerintah daerah menyambut baik dengan telah terbentuknya fraksi-fraksi di

DPRD Sumbar. Dia mengungkapkan, posisi fraksi di DPRD merupakan wadah penghubung untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah, terutama untuk menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakili.

"Fraksi mempunyai peran yang sangat strategis antara lain memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD baik diminta maupun tidak diminta, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota fraksi, memberikan pandangan umum tentang pengambilan keputusan persetujuan, penolakan, atau kebijakan lainnya," ungkap Audy.

Dia menyampaikan, pemerintah daerah sangat yakin dan percaya posisi strategis dari fraksi-fraksi dalam menentukan anggota yang akan ditempatkan dalam AKD akan selalu mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja setiap anggota DPRD.

"Disinilah letak peranan strategis dari fraksi dalam rangka mensukseskan pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD, harus ada kesesuaian antara kompetensi dan pengalaman anggota DPRD dengan alat kelengkapan yang akan ditempatkan," ujarnya. (401)

DIHADIRI RIBUAN PESERTA BUPATI AGAM :

## Alek Nagari Perkuat Tali Silaturahmi Antar Warga

**LUBUK BASUNG** - Bupati Agam diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Agam, Handria Asmi, menghadiri Alek Anak Nagari Porbi, di Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Minggu (15/9).

Acara tersebut merupakan bagian dari kegiatan adat dan budaya masyarakat setempat yang bertujuan untuk memperkuat tali silaturahmi antar warga.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam melestarikan adat istiadat Minangkabau, sekaligus memperkuat peran nagari sebagai pusat kearifan lokal.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Agam, menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang memperkuat nilai-nilai adat dan budaya.

"Nagari adalah fondasi dari kebersamaan kita, dan melalui kegiatan seperti ini, kita bisa menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan antar masyarakat," katanya.

Alek anak nagari Porbi dihadiri oleh kurang lebih 1000 peserta dalam 150 tim berbagai daerah di Agam dan Sumbar.

Tokoh Masyarakat Kabupaten Agam, Dr (HC) Drs H Martias Wanto MM dt Maruhun, memberikan apresiasi atas tingginya partisipasi warga dalam pelaksanaan kegiatan ini.

"Kegiatan ini luar biasa, karena peran anak nagari dalam menjaga dan melestarikan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi," katanya. (210)



**KEGIATAN** - Tokoh masyarakat Agam Martias Wanto saat mengikuti kegiatan silaturahmi porbi Agam belum lama ini. (Ist)

## Program Inovasi DPKH Sumbar 3 UPTD Proses Jadi BLUD



Sukarli

**PADANG** - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Sumbar terus melakukan upaya inovasi dalam berbagai program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

Salah satunya tengah mengupayakan 3 UPTD dari 5 UPTD yang dimiliki berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Hal itu ditegaskan Kepala DPKH Sumbar, Sukarli menjawab Singgalang di kantornya baru-baru ini. Disebutkannya, 3 UPTD tersebut saat ini sedang tahap visitasi dari tim penilai Sumbar. Seperti UPTD Rumah Sakit Hewan di Padang, UPTD Ternak Unggas di Simpang Empat Pasaman Barat, UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) Payakumbuh.

Sedangkan UPTD Ruminansia Pasaman Barat dan UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP) belum diusulkan. Lebih jauh disebutkan, 2 UPTD tersebut akan diusulkan bila 3 UPTD tahap awal sudah menjadi BLUD dan berjalan cukup baik. "Kita berharap 3 UPTD yang sedang proses penilaian oleh tim penilaian dari Sumbar bisa berjalan dengan baik dan berhasil bisa berubah menjadi BLUD," kata Sukarli.

Lebih jauh disebutkan, proses perubahan UPTD jadi BLUD tersebut cukup panjang. Dimulai dari pengisian template oleh setiap UPTD dan dilanjutkan dengan visitasi ke lapangan langsung oleh tim.

Visitasi ke lapangan tersebut adalah untuk mengecek langsung penyesuaian pengisian template dengan kondisi riilnya. Setelah itu dilanjutkan dengan pengecekan kelengkapan administrasi yang diteruskan ke Sekda dan ditindaklanjuti ke Kementerian Dalam Negeri.

"Kita berharap pada tahun 2025, ketiga UPTD dimiliki DPKH Sumbar bisa berubah status menjadi BLUD," terang Sukarli. Dijelaskan Sukarli, diupayakan berubahnya status dari UPTD menjadi BLUD selain sebagai program inovasi namun juga berdampak luas terhadap peningkatan layanan kepada masyarakat. Menurutnya dengan menjadi BLUD tersebut maka bisa memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat dengan ketersediaan obat-obatan setiap saat. Sebab, BLUD memiliki kewenangan untuk membeli kebutuhan BLUD tersebut bila dalam proses tahun anggaran berjalan stoknya habis. Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat pun tak terputus.

Ditambahkannya, tak hanya itu saja juga akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar.

"Jadi dengan menjadi BLUD maka pelayanan kemasyarakatan semakin baik dan PAD Sumbar meningkat. Kita berupaya maksimal pada tahun 2025 mendatang bisa terwujud," tegas Sukarli. (103)

DORONG UMKM SUKSES DI PASAR GLOBAL

## PLN Beri Pelatihan Ekspor

**JAKARTA**, 14 September 2024- PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara berkomitmen mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk go global. Hal ini tercermin lewat upaya PLN memberikan pelatihan kepada 107 pelaku UMKM untuk dapat mitra binaan mampu menembus pasar mancanegara.

Pelatihan dilakukan sebanyak enam kali secara daring pada Agustus-September 2024 dengan materi menjajaki potensi UMKM Indonesia di pasar

berbagai negara (India, Australia, Hongkong, Mesir, Taiwan, dan Jepang) dan panduan persiapan UMKM menembus pasar ekspor.

Setelah melewati tahap pelatihan, peserta UMKM binaan PLN ini akan dikurasi untuk berkesempatan mengikuti business matching saat Trade Expo Indonesia pada 9-12 Oktober 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai, Tangerang. Dalam kegiatan tersebut peserta akan dipertemukan dengan calon pembeli dari luar negeri.

Salah satu peserta pelatihan, Nurkamala (42) yang berasal dari UMKM Fashters yang bergerak di bidang kerajinan tangan asal Jakarta mengatakan, bimbingan dan pelatihan ekspor yang diberikan PLN ini sangat berguna bagi dirinya dan para pelaku UMKM lainnya. Melalui bimbingan ini, pelaku UMKM kini mengetahui potensi dari produk-produk Indonesia di pasar global.

"Kami dari Fashters berterima kasih kepada PLN dan bangga karena sudah mengikutsertakan dan member-

dayakan kami UMKM di local champions agar bisa menembus pasar global. Ini menjadi kesempatan kami memasarkan produk kami untuk go global," ujarnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, salah satu misi PLN adalah turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui pengembangan UMKM. Sebagai penggerak perekonomian, PLN ingin terus memperluas jangkauan pasar UMKM dan memiliki daya saing hingga ke level internasional.

"Harapan kami PLN dapat semakin produktif dalam membantu UMKM untuk menggapai selayang hingga ke level global, sehingga dapat bertumbuh pesat dan meningkatkan ekonomi masyarakat," ujar Darmawan.

Ke depannya, Darmawan memastikan PLN akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM naik kelas. Dengan begitu, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Meningkatkan kapasitas UMKM itu penting demi keberlangsungan pelaku UMKM itu sendiri, dan menjadi penentu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi, orientasi tidak hanya untuk penjualan dalam negeri tapi bisa jauh sampai pasar internasional," pungkas Darmawan. (105)



**KERAJINAN** - Produk UMKM Fashters berupa kerajinan tangan menarik perhatian pengunjung saat Pameran Kerajinan Nusantara Kriyanusa 2024 bulan lalu. (Ist)

TUNTUT KUOTA PPPK

# Nakes Pasbar Datangi DPRD

PASBAR - SINGGALANG

Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) yang tergolong dalam Forum Tenaga Kesehatan BKN Terdata Pasaman Barat, kembali mendatangi Gedung DPRD Pasbar, Selasa (17/9).

Kedatangan mereka membawa harapan agar adanya kuota untuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi kesehatan.

Ketua Forum Tenaga Kesehatan BKN Terdata, Ira, kemarin, mengatakan, rata-rata tenaga kesehatan telah bertugas di puskesmas dan RSUD selama 10 tahun sampai 19 tahun dengan menyandang status Tenaga Harian Lepas.

"Ya, sebanyak 1.200 formasi PPPK yang ada, hendaknya 324 dari itu untuk tenaga kesehatan sehingga keluhan mereka akan tertutupi. Karena data kita yang 324 itu sudah ada di BKN dan kita sudah bekerja di instansi masing-masing sehingga data kita itu tidak data kaleng-kaleng," katanya.

Dikatakan, kalau data mereka sudah di BKN dan mereka selama ini juga sudah bekerja di masing-masing instansi, berupa di puskesmas dan di RSUD yang ada di Pasbar, sehingga kalau data itu dima-



TERIMA ASPIRASI - Ketua (Sementara) DPRD Pasbar, Dirwansyah, Wakil Ketua (Sementara) Supriyono, dan lainnya saat menerima aspirasi tenaga kesehatan daerah setempat, Selasa (17/9). (arafat)

sukkan sebanyak 324 formasi maka jelas akan terpenuhi. "Kita berharap agar DPRD dapat memfasilitasi mereka dengan harapan mereka diangkat menjadi PPPK. Namun mirisnya dalam rekrutmen pegawai PPPK Pasbar tahun ini untuk tenaga kesehatan, hanya ada 4 formasi," katanya.

Saat ini, lanjutnya, tenaga kesehatan yang masih berstatus pegawai honorer dan non PNS, berjumlah sebanyak 324 orang, diharapkan dengan jumlah yang tidak banyak lagi ini, semua tenaga kesehatan bisa diberikan kesempatan untuk menjadi pegawai PPPK.

"Kita berharap aspirasi kami ini dapat diakomodir, supaya kita juga bisa merasakan menjadi pegawai PPPK," katanya.

Sementara itu, Ketua sementara DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi tenaga kesehatan tersebut sampai pada titik terangnya. "Kita akan perjuangkan mereka. Kita sangat kasihan melihat mereka yang telah mengabdikan puluhan tahun, namun hanya menyandang status Tenaga Harian Lepas (THL). Makanya, mereka memang harus diangkat untuk PPPK ini," katanya.

Dikatakan, mereka merupakan garda terdepan bagian kesehatan di tengah-tengah masyarakat, namun disayangkan mereka juga garda terdepan dalam mendapatkan hak mereka. Ia juga mengatakan, mereka

siap menampung semua aspirasi mereka, untuk memperlancar status mereka sebagai PPPK. Mereka juga akan memanggil dinas terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sementara, Denika Saputra dari Partai PPP mengatakan, dalam undang-undang PPPK yang harus diutamakan ada mereka tenaga kesehatan.

"Mereka harus diutamakan, karena mereka merupakan garda terdepan untuk kesehatan masyarakat di Pasbar," katanya. (arafat)

## Angin Kencang, 1 Rumah Ditimpa Pohon

AGAM - Akibat angin kencang, bangunan rumah tempat tinggal Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Saiyo Sarasaki Irwandra di Jorong Koto Gadang, Nagari Koto Gadang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, tertimpa pohon tumbang, Senin (16/9) sekitar pukul 05.30 WIB.

Peristiwa tumbang pohon rambutan yang menimpa bangunan rumah tempat tinggal Irwandra itu, membuat masyarakat sekitar sontak terkejut. Terlebih, bunyi hantaman pohon yang menimpa atap rumah cukup kuat, sehingga subuh menjelang pagi warga berdatangan ke lokasi kejadian.

Irwandra menjelaskan, bahwa rumah yang ia tempati tersebut merupakan bangunan rumah guru yang dibangun oleh pemerintah. Kini, akibat bangunan rumah ditimpa pohon, tidak bisa ditempati lagi karena bagian atapnya hancur.

Melihat kondisi bangunan rumah hancur, ucap Irwandra, ia bersama keluarga saat ini mencari tempat tinggal atau pindah rumah dekat pasar Koto Tinggi.

Wali Nagari Koto Gadang, Yuzerzal bersama Wali Nagari Koto Tinggi bersama aparat pemerintahan nagari, paginya sudah sampai di lokasi kejadian. (511)



HANCUR - Bangunan rumah di Jorong Koto Gadang, Nagari Koto Gadang, Kecamatan Baso, Agam, tertimpa pohon tumbang, Senin (16/9) sekitar pukul 05.30 WIB. (kasnadi.np)

### Pimpinan DPRD ...

pan pimpinan definitif perlu segera selesai agar tugas dan fungsi kedewanan bisa dilaksanakan dengan maksimal.

"Ada sejumlah agenda penting, salah satu pembahasan dan penetapan APBD Tahun 2025," ujar Irsyad.

Berdasarkan peraturan dari pemerintah pusat, kesepakatan dan penetapan APBD oleh DPRD bersama pemerintah daerah mesti dilaksanakan paling lambat tanggal 30 November.

Irsyad mengatakan, pasca persiapan dan penetapan keanggotaan DPRD Sumbar periode Tahun 2024-2029 dilaksanakan pada 28 Oktober lalu, DPRD masih dipimpin oleh ketua dan wakil ketua Sementara ketua dan wakil

ketua sementara tidak memiliki kewenangan penuh sebagai unsur pimpinan definitif.

Adapun tugas pimpinan sementara di antaranya, yakni memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan tentang tata tertib DPRD dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

Sejauh ini, lanjut Irsyad, DPRD telah menetapkan dan mengumumkan unsur pimpinan dan anggota fraksi-fraksi DPRD Sumbar.

Ada delapan fraksi. Fraksi PKS dengan struktur penasehat Muhidi, Ketua Irsyad Syafar, Wakil Ketua Mochklasim, Sekretaris Syofyan Hendri dan Bendahara Gustami Hidayat.

Kemudian Fraksi Gerindra dengan Pembina Evi Yandri Rajo Budiman, Ketua Khai

ruddin Simanjuntak, Wakil Ketua Verry Mulyadi dan Sekretaris Mario Syah Johan.

Fraksi Partai Golkar diketuai Yogi Pratama, Wakil Ketua Zulkenedi Said, Sekretaris Sitti Izzati Aziz dan Bendahara Zakasri Kasni.

Fraksi NasDem diketuai Endarmy, Wakil Ketua Abdul Rahman dan Sekretaris Erick Hamdani Dt. Ambasa.

Fraksi PAN dengan penasehat Indra Dt. Rajo Lelo, Ketua Muhayatul., Wakil Ketua Muzli M Nur dan Sekretaris Daswanto.

Fraksi Partai Demokrat diketuai Doni Harsiva Yandri, Wakil Ketua Jefri Masrul, Sekretaris Gino Irwan dan Bendahara Benny Saswin Nasrun.

Kemudian, Fraksi PPP diketuai Sawal Dt. Putihah, Wakil Ketua Daswippetra Dt. Manjinjiang Alam dan Sekretaris

Neldaswenti.

Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB diketuai Albert Hendra Lukman dengan Wakil Ketua Firdaus dan Sek

retaris Donizar.

Selain menetapkan unsur pimpinan definitif, DPRD juga perlu segera menetapkan alat kelengkapan dewan (AKD)

yakni Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Perda dan susunan komisi-komisi. (401)

### Mendorong ...

dalam Pilkada serentak Sumbar 2024. Dengan rincian 2 paslon tingkat provinsi dan 54 paslon di kabupaten dan kota. Dari nama yang muncul mayoritas para calon merupakan laki-laki. Sementara pasangan calon perempuan hanya terdapat di tiga daerah yakni Kabupaten Solok, Emiko sebagai bakal calon bupati, kemudian Desni Seswinari bakal calon wakil walikota Sawahlunto dan pasangan Annisa Suci Ramadhani dan Leli Arni bakal calon bupati dan wakil bupati Dharmasraya.

Menurut penulis, fenomena seperti di atas suatu hal yang cukup miris, karena calon perempuan yang maju sangat sedikit. Padahal, kesempatan untuk menjadi calon sangat terbuka lebar. Inilah yang perlu menjadi perhatian bersama. Apakah benar memang perempuan tidak mampu menjadi calon kepala daerah ataukah dinamika politik yang membuatnya tidak dapat maju?

Jika diperhatikan cukup banyak sebetulnya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, penyelenggara pemilu, ormas bahkan pemerintah daerah. Tujuannya agar kaum perempuan terlibat aktif dalam politik, tidak hanya sekadar menjadi pemilih tetapi lebih dari pada itu juga ikut menjadi peserta pemilu. Tetapi setelah 20 tahun pemilihan kepala daerah berlangsung, keikutsertaan kaum perempuan dalam pemilihan kepala daerah masih terasa minim.

Ke depan memang harus ada dukungan moral dan regulasi yang kuat untuk membuka ruang agar kaum perempuan lebih banyak untuk maju sebagai calon kepala daerah. Selain mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon, perlu juga regulasi yang mengatur keikutsertaan kaum perempuan ini.

Jika diperhatikan, regulasi di pemilihan legislatif sudah ada kuota 30 persen perempuan dalam mengisi pencalonan di DPR dan DPRD. Alangkah baiknya aturan tersebut juga diberlakukan dalam proses dalam pemilihan kepala daerah. Misalnya penulis mengusulkan ada sebuah kewajiban di antara pasangan calon harus ada unsur perempuan. Yakni calon kepala daerah laki-laki sedangkan wakilnya perempuan atau sebaliknya. Hal ini makin mempertegas posisi perempuan dalam kepemimpinan politik lokal.

Pentingnya perempuan dalam memimpin daerah karena ia lebih banyak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan

keinginan perempuan. Apalagi urusan tentang perempuan sangatlah banyak, soal ibu hamil dan menyusui, stunting, kekerasan terhadap perempuan yang mesti menjadi perhatian. Sehingga sedari awal telah dikaji posisi unit kerja seperti dinas pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, PKK dan lainnya merupakan sinyal bahwa ide perempuan untuk memikirkan nasib mereka harus diberikan kesempatan yang lebih.

Menurut Kurniawati Hastuti Dewi, peneliti Pusat Riset Politik LIPI/BRIN bahwa akar masalah rendahnya jumlah pencalonan dan keterpilihan perempuan salah satunya ada diproses kandidasi yang dilakukan parpol. Berdasarkan penelitian dan pendapat beliau, terdapat beberapa penyebab rendahnya pencalonan wakil perempuan, yaitu pertama, oligarki politik. Kurniawati sering menyoroti bahwa sistem politik Indonesia masih didominasi oleh sekelompok elit yang umumnya laki-laki. Oligarki ini cenderung mempertahankan status quo dan enggan memberi ruang lebih besar bagi perempuan dalam politik.

Kedua, pragmatisme partai politik, maksudnya partai-partai sering lebih memilih calon yang dianggap "elektable" berdasarkan kriteria tradisional seperti popularitas dan jaringan politik yang kuat. Hal ini sering merugikan calon perempuan yang mungkin belum memiliki exposure politik seluas calon laki-laki.

Ketiga, kultur patriarki masyarakat Indonesia masih kuat dipengaruhi budaya patriarki yang memandang politik sebagai domain laki-laki. Ini menciptakan hambatan psikologis dan sosial bagi perempuan untuk terjun ke politik.

Keempat, beban ganda perempuan. Kurniawati sering menekankan bahwa perempuan Indonesia masih dihadapkan pada ekspektasi untuk menjalankan peran domestik sambil berkarir. Ini membuat banyak perempuan potensial enggan terjun ke dunia politik yang menyita waktu.

Kelima, kekerasan politik berbasis gender. Penelitian Kurniawati juga menunjukkan adanya ancaman kekerasan verbal, psikologis, bahkan fisik yang dihadapi perempuan dalam politik. Ini dapat menjadi faktor penghambat partisipasi.

Keenam, kurangnya kaderisasi perempuan dalam partai politik. Partai politik dinilai belum serius dalam melakukan kaderisasi perempuan untuk posisi-posisi strategis, ter-

masuk kepala daerah.

Ketujuh, Interpretasi sempit atas keterwakilan perempuan. Kurniawati mengkritik kecenderungan partai-poliya memenuhi kuota 30 persen untuk caleg perempuan tanpa benar-benar mendorong mereka ke posisi-posisi pimpinan seperti kepala daerah. Kehadiran perempuan hanya memenuhi persyaratan saja untuk dapat mendaftarkan calon untuk anggota legislatif.

Kedelapan, kurangnya role model. Sedikitnya jumlah perempuan yang berhasil menjadi kepala daerah membuat calon-calon perempuan lain kurang percaya diri untuk mencalonkan diri.

Kesembilan, media dan stereotip gender. Pemberitaan media yang sering bias gender turut mempengaruhi persepsi publik terhadap kapabilitas perempuan sebagai pemimpin.

Kurniawati Hastuti Dewi menekankan bahwa untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi sistem politik, perubahan budaya, penguatan kapasitas perempuan, dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga perempuan dapat dengan percaya diri mencalonkan diri sebagai wakil rakyat ataupun kepala daerah.

Akhirnya penulis berkeinginan agar terus ada gerakan pendidikan politik yang massif kepada pemilih perempuan dengan tujuan meningkatkan partisipasi mereka sekaligus mengetuk kesadaran tentang pertimbangan dalam memilih calon dalam pemilu. Selain itu dari sekarang mempersiapkan diri agar bisa maju sebagai peserta pemilu. Karena disadari memang untuk menjadi peserta pemilu tidak hanya sekadar dorongan tetapi kaum perempuan juga hendaknya mempersiapkan mental. Dan yang tak kalah penting dalam kontestasi pemilu saat ini perlu kesiapan logistik dan dukungan jaringan yang kuat agar bisa terpilih.

Diperlukan upaya komprehensif melibatkan pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan. Selain itu penting juga bagi parpol untuk menyiapkan kader-kader perempuan yang potensial sehingga partisipasi politik perempuan pun bisa meningkat.

(Dr. Zona Rida Rahayu, M.Pd. Dosen Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok)

**PANITIA SELEKSI**  
**CALON DIREKTUR KREDIT DAN SYARIAH**  
**PT. BANK NAGARI PERIODE 2024-2028**  
**Jl. Jend Sudirman No. 51 Padang**

---

**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI**  
**BAKAL CALON DIREKTUR KREDIT DAN SYARIAH**  
**PT BANK NAGARI PERIODE 2024-2028**

- Panitia Seleksi telah menerima 5 (lima) berkas Bakal Calon Direktur Kredit dan Syariah, dan telah melakukan seleksi terhadap berkas persyaratan Administrasi pada tanggal 17 September 2024.
- Dari 5 (lima) orang Bakal Calon Direktur yang mengajukan lamaran, Pelamar yang memenuhi persyaratan Administrasi adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Eka Andria Putra	Jl. Ikan Mas Blok C No.1 Lubuk Indah RT.002, RW.013, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur Kota Padang
2.	Hafid Dauli	Jl. Jhoni Anwar No.73 Lapai RT.007, RW.001 Kelurahan Kampung Lapai Kec. Nanggalo Kota Padang.
3.	Hardi Putra	Filano Jaya I Blok D4/7F RT.004, RW.006 Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang.
4.	Oktra Firdaus	Jl. Soekarno Hatta No. 17 Jorong Diponegoro Nagari Baringin, Kec.Lima Kaum Batu Sangkar Kab. Tanah Datar.
5.	Yunasrul	Komp. Plam Griya Indah II Blok C No. 07 RT.004, RW.005 Kelurahan Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang.

- 5 (lima) orang Bakal Calon Direktur Kredit dan Syariah yang lulus tahap administrasi ini, akan diundang untuk mengikuti tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).
- Keputusan Panitia bersifat mengikat, mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

17 September 2024  
PANITIA SELEKSI  
DIR. KREDIT & SYARIAH  
PERIODE 2024-2028  
RUDY JOINALDY